

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LABUHAN BATU**

**TUGAS AKHIR**

Oleh :

**IMELDA IRMADHANA PUTRI**  
**2003100062**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : Imelda Irmadhana Putri  
N P M : 2003100062  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHAN BATU**

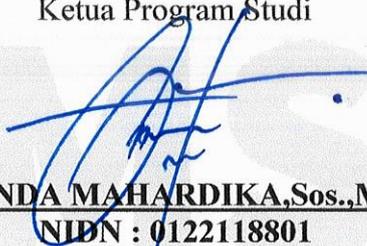
Medan, 13NOVEMBER 2024

Dosen Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H  
NIDN : 0130056601

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, Sos., M.SP  
NIDN : 0122118801



Belan  
Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP  
NIDN : 0030017402

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Imelda Irmadhana Putri  
NPM : 2003100062  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Jum'at, 27 Desember 2024  
Waktu : 08.15 s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY,SH.,MM

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP

PENGUJI III : SYAFRUDDIN,S.Sos,MH

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Imelda Irmadhana Putri, NPM : 2003100062**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 27 Desember 2024

Yang Menyatakan,



**Imelda Irmadhana Putri**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LABUHAN BATU**

**IMELDA IRMADHANA PUTRI**

**2003100062**

**ABSTRAK**

Gepeng merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu karena Gepeng telah dianggap sebagai profesi pekerjaan yang mudah, bahkan sudah bertindak kriminal dan mengganggu kenyamanan masyarakat seperti mengganggu pengendara dengan cara menggoreskan kaca mobil. Permasalahan Gepeng saat ini masih tetap menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, Gepeng merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu terhadap Implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data dengan model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah awal Dinas Sosial Labuhan Batu dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yakni diawali dengan pendataan atau identifikasi, penyuluhan dan sosialisasi, melakukan pembekalan keterampilan, program bantuan dan rehabilitasi, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Tantangan yang dihadapi diantaranya adalah ketergantungan gepeng terhadap kehidupan di jalanan, dan yang paling sering terjadi adalah tentang masalah kesehatan fisik dan mental. Ada beberapa jenis pelayanan yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial diantaranya adalah: 1) Pelayanan KPM Program Keluarga Harapan, 2) Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 3) Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai, 4) Pelayanan Rehabilitas Sosial, dan lain sebagainya. Kemudian cara Dinas Sosial memastikan bahwa program permintaan yang dilaksanakan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara adalah: 1) Pendampingan jangka panjang, 2) Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas, 3) mentoring dan evaluasi berkala, serta 4) Melakukan kemitraan dengan lembaga lain.

**Kata kunci : Implementasi, Program Pembinaan, Gelandang dan pengemis**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, puji dan syukur penulis panjatkan atas limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan Allah Shubhanallah wa Ta'ala kepada setiap makhluk-Nya penulis berhasil melalui tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHAN BATU** ”. Shalawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi wa Sallam suri tauladan.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda **Bustami** dan Ibunda **Fatimah** yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa. Mereka yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan dukungan baik moral maupun materil selama proses penyelesaian skripsi ini.

Saat menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan doa dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin secara khusus menyebutkan beberapa pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berarti selama penelitian:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Dr. Abrar Adhani M.I.Kom selaku Wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Yurisna Tanjung M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H Selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai biro FISIP UMSU yang telah membantu penulis dalam memenuhi kelengkapan berkas penulis.
9. Kepada kedua saudara kandung penulis Aprial Bustam dan Novryal Ilham. Terima kasih atas segala doa, nasehat, moral atau materil, dan support yang telah diberikan kepada penulis.
10. Teruntuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fahri Darmansyah. Terimakasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup saya, berkontribusi dalam tugas akhir ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang

menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

11. Teruntuk diri saya Imelda Irmadhana Putri terimakasih telah kuat sampai detik ini,yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar,yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi.

Kepada mereka semua penulis tidak bisa memberikan balasan apapun hanya sekedar ucapan terimakasih dan permohonan maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula. Jazakumullahu Khairan penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menantikan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya Aamiin.

Medan, Oktober 2024

**IMELDA IRMADHANA PUTRI**  
**2003100062**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II .....</b>	<b>7</b>
<b>URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Implementasi Program .....	7
2.2 Pembinaan .....	10
2.3 Gelandangan dan Pengemis .....	16
2.4 Dinas Sosial.....	20

<b>BAB III.....</b>	<b>22</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep .....	23
3.3 Defenisi Konsep .....	24
3.5 Kategorisasi Penelitian.....	25
3.6 Narasumber Penelitian .....	26
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.8 Teknik Analisis Data.....	27
3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
3.10 Deskripsi Singkat Objek Penelitian .....	29
3.10.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Labuhan Batu .....	45
3.10.2 Visi dan Misi Dinas Sosial.....	46
3.10.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Labuhan Batu.....	47
3.10.4 Struktur Organisasi.....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	57
4.2 Pembahasan.....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>57</b>

<b>PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
5.1 Simpulan .....	57
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Korten .....	9
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 4. 1 Dinas Sosial Labuhan Batu .....	45
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Labuhan Batu .....	57

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Draft Wawancara.....	62
Lampiran 2 Struktur Organisasi dan Visi Misi Dinas Sosial.....	63
Lampiran 3 Form Asessment PPKS dan Surat Pernyataan.....	64
Lampiran 4 Form Asessment PPKS dan Surat Pernyataan.....	66
Lampiran 5 Form Asessment PPKS dan Surat Pernyataan.....	68
Lampiran 6 Berita Acara.....	70
Lampiran 7 Dokumentasi.....	71
Lampiran 8 SK-1.....	75
Lampiran 9 SK-2.....	75
Lampiran 10 SK-3.....	76
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran 12 Surat Balasan Izin Penelitian.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Program pembangunan baik di Indonesia maupun di negara lain telah mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan dinamika masyarakat sebagai produk sampingan pembangunan nasional. Akan tetapi, peningkatan ekonomi ini juga memicu gelombang urbanisasi dari desa ke kota, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu. Kelompok seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen kerap terpaksa merantau karena mereka tidak siap bersaing, sumber daya manusia mereka masih lemah, dan lapangan kerja di desa belum menghasilkan peluang yang memadai

Gelandangan dan pengemis, yang sering disingkat sebagai Gepeng, merupakan fenomena sosial yang masih marak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Mereka menjadi pemandangan umum di hampir semua kota, mulai dari jalanan ibu kota hingga kawasan pinggiran. Keberadaan Gepeng bukan hanya mencerminkan permasalahan ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan ketimpangan sosial, lemahnya sistem perlindungan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan tetap, serta hidup mengembara di tempat umum. Sementara itu,

pengemis adalah individu yang memperoleh penghasilan dengan meminta-minta di muka umum melalui berbagai cara demi mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Sitorus et al., 2020).

Permasalahan Gepeng sangat kompleks karena berkaitan erat dengan faktor struktural dan kultural, seperti kemiskinan, urbanisasi, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya pendidikan, hingga kurangnya perhatian keluarga. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan oleh pemerintah dan lembaga sosial, keberadaan Gepeng masih terus meningkat, bahkan cenderung menjadi persoalan kronis yang sulit diberantas. Selain menimbulkan kesan kumuh dan mengganggu ketertiban umum, keberadaan Gepeng juga sering dikaitkan dengan eksploitasi anak, sindikat, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Gambaran ini mempertegas bahwa persoalan sosial di tanah air masih sangat serius. Masih banyak warga dengan nasib kurang beruntung yang akhirnya hidupnya tergantung di jalanan. Sebagian dari mereka memilih bekerja sebagai pengasong, penyemir sepatu, pemulung, atau pengamen. Sementara sisanya mengambil jalan pintas dengan menjadi pengemis demi memenuhi kebutuhan hidup.

Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) hingga saat ini tetap menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan fenomena ini menuntut keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara sinergis agar kesenjangan sosial dapat semakin ditekan. Gepeng sendiri muncul sebagai kantong-kantong kemiskinan di perkotaan, yang dipicu oleh tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang kian mendesak.

Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) memerlukan proses penanganan yang tidak singkat, karena pada waktu-waktu tertentu—seperti hari libur, hari raya keagamaan, atau di pusat rekreasi dan mal—jumlah pengemis sering melonjak, sehingga polanya naik-turun jika digambarkan dalam grafik. Kesenjangan sosial yang lebar terutama disebabkan oleh distribusi ekonomi yang tidak merata, menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin, khususnya di kota-kota besar. Kemudahan meraih penghasilan di kota-kota seperti Labuhan Batu, Medan, dan kota besar lainnya menjadi magnet bagi pendatang tanpa bekal keterampilan atau pendidikan memadai. Kurangnya keahlian, dorongan memenuhi kebutuhan hidup, serta kecenderungan untuk mengambil jalan instan membuat sebagian orang memilih menjadi pengemis.

Banyaknya gelandangan dan pengemis di kota-kota besar tidak semata-mata disebabkan ketiadaan lapangan kerja, melainkan juga minimnya kemauan untuk berusaha dan kurangnya keterampilan. Faktanya, kita kerap menjumpai gelandangan yang sebenarnya masih mampu melakukan berbagai pekerjaan apa pun, asalkan bisa memperoleh penghasilan untuk makan sehari-hari.

Labuhan Batu, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan keberadaan perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, dan berbagai sarana hiburan yang menarik minat pendatang. Namun demikian, tingginya arus urbanisasi ini belum diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Selain itu, kurangnya keterampilan urban, tuntutan persaingan yang ketat, membuat mereka akhirnya memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

Kegiatan gelandangan dan pengemis seringkali dipicu oleh tekanan ekonomi. Kebutuhan hidup yang mendesak memaksa sebagian orang mencari jalan keluar apapun, termasuk dengan menjadi pengemis. Fenomena ini tidak mengenal batasan usia—mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia atau tunawisma. Jumlah gelandangan dan pengemis terus bertambah setiap hari. Mereka kerap terlihat di perempatan lampu merah, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat wisata dan lokasi keramaian lainnya.

Dinas Sosial memiliki tugas utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Labuhan Batu, beberapa langkah telah diambil untuk menanggulangi pengemis, antara lain: memberikan sosialisasi kepada publik agar tidak memberi uang kepada gelandangan dan pengemis; menggelar razia untuk menertibkan mereka; serta memulangkan para pengemis ke daerah asalnya. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil optimal, karena masih banyak warga yang terus memberikan sedekah, dan mereka yang dipulangkan kerap kembali lagi setelah razia selesai (Ramadhani, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, perilaku gelandangan dan pengemis di kalangan masyarakat dipandang sebagai persoalan serius, termasuk di Kabupaten Labuhan Batu. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu telah mengeluarkan sejumlah Peraturan Daerah untuk menanggulangi maraknya gelandangan dan pengemis. Jika tidak ditangani dengan tepat, permasalahan ini tidak hanya merugikan pelaku dan keluarganya, tetapi juga masyarakat sekitar, karena dapat memicu tindak kriminal seperti pencopetan maupun pencurian. Tanpa kebijakan dan langkah-langkah khusus untuk mengatasi dampak negatif pertumbuhan ekonomi, jumlah

gelandangan dan pengemis bisa terus berfluktuasi—menaik dan menurun—dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Labuhan Batu**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang ditetapkan penulis sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Labuhan Batu?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk menjelaskan Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Labuhan Batu?”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 12. Manfaat Teoritis

Menyajikan informasi dan rekomendasi yang berguna bagi Dinas Sosial serta instansi terkait, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat luas dalam memperhatikan dan membantu penyelesaian permasalahan gelandangan dan pengemis sebagai tanggung jawab bersama.

### 13. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

#### 14. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi salah satu syarat menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### 15. BAB I : PENDAHULUAN

16. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### 17. BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi tentang teori relevan dengan masalah yang ingin diteliti seperti adanya Implementasi Program, Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini mengungkapkan Jenis penelitian, Kerangka Konsep, Kategorisasi Penelitian, Narasumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi Program**

##### 18. Implementasi

Implementasi adalah tahap akhir dari rangkaian aktivitas dan mekanisme dalam suatu sistem, di mana segala rencana dan keputusan dijalankan secara terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini melibatkan perluasan dan penyesuaian berbagai tindakan dengan sasaran yang ingin diraih, serta membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan pokok—biasanya berupa undang-undang, tetapi juga mencakup instruksi atau keputusan eksekutif maupun putusan pengadilan—dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

Pada umumnya, sebuah keputusan menyoroiti masalah yang hendak diselesaikan, merumuskan secara jelas tujuan atau sasaran yang akan dicapai, serta merancang berbagai metode untuk mengorganisir proses pelaksanaannya. Menurut Metter dan Horn, implementasi terdiri dari serangkaian tindakan—baik yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, maupun pihak swasta—yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan yang diangkat dinilai sudah cukup baik dalam tahap implementasinya (Daulay, 2022).

Beberapa definisi di atas memperoleh kesimpulan bahwa implementasi adalah proses yang bersifat dinamis, di mana para pelaksana kebijakan menjalankan berbagai aktivitas atau tindakan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terarah guna mencapai sasaran tertentu (Jailani et al., 2020).

#### 19. Program

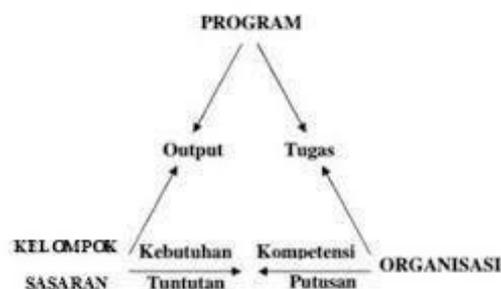
Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu rencana yang memuat prinsip-prinsip serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan (Departemen Pendidikan Nasional). Jones dan Rohman menambahkan bahwa program adalah salah satu elemen kebijakan yang berwenang mencapai tujuan tertentu. Sebagai komponen awal dalam implementasi, program harus ada terlebih dahulu. Unsur kedua dalam pelaksanaan program adalah keterlibatan kelompok masyarakat sasaran, sehingga program tersebut memberikan hasil nyata dan membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Jika masyarakat tidak memperoleh manfaat, maka program tersebut dapat dianggap gagal. Keberhasilan implementasi sebuah program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan oleh pihak eksekutif.

Unsur pelaksana, sebagai elemen ketiga, memegang peranan krusial karena baik lembaga maupun individu yang terlibat bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan selama proses implementasi. Agar implementasi program berjalan efektif, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah

konkret—mulai dari penggalangan dana hingga pengelolaan sumber daya alam dan manusia—sehingga tujuan program dapat tercapai dengan optimal (Ariska Tri Viky Andani & Endah Setyowati, 2019).

Model implementasi program David C. Korten—dikenal sebagai *fit* atau *suitability model*—menekankan bahwa keberhasilan suatu program sangat bergantung pada kesesuaian (*fit*) antara tiga elemen utama: program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Selain itu, Korten melihat implementasi sebagai proses pembelajaran bertahap, di mana organisasi belajar menjadi efektif, efisien, dan akhirnya mampu mengembangkan programnya secara lebih luas melalui interaksi langsung dengan masyarakat penerima manfaat.

Model Kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



*Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)*

**Gambar 2. 1 Model Kesesuaian Korten**

Pada model *fit* David C. Korten, keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada tercapainya **kesesuaian** (*conformity*) antara tiga unsur utama:

a) Kesesuaian antara program dan pemanfaat

20. Maksudnya adalah apa yang disiapkan oleh program harus benar-benar cocok dengan kebutuhan dan harapan kelompok sasaran.

b) Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana

21. Dengan kata lain, tugas-tugas yang dibebankan oleh program perlu sesuai dengan kapasitas, baik dari segi sumber daya maupun kompetensi yang dimiliki oleh lembaga atau tim pelaksana.

c) Kesesuaian antara pemanfaat dan organisasi pelaksana

22. Ini menekankan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan organisasi agar kelompok sasaran dapat menerima manfaat program harus realistis dan sesuai dengan kemampuan nyata dari para pemanfaat.

## **2.2 Pembinaan**

23. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha atau kegiatan yang mencakup proses membina, memperbaiki, dan melakukan tindakan secara efektif dan efisien agar tercapai perbaikan atau hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut ahli lain Pembinaan adalah upaya terencana yang mencakup pengelolaan dan pengawasan untuk mencapai hasil optimal. Untuk menyelaraskan kepentingan individu dan organisasi, pembinaan fokus pada peningkatan disiplin dan motivasi. Masyarakat juga melihatnya sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan, sehingga pembinaan berperan dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan etos kerja demi mendukung pembangunan nasional.

24. Fungsi Pembinaan

25. Menanamkan rasa loyalitas dan kepatuhan.

26. Mendorong peningkatan tanggung jawab, keseriusan, dan semangat dalam

bekerja.

- 27. Mengoptimalkan hasil kerja secara maksimal.
- 28. Menciptakan pelayanan organisasi yang efektif.
- 29. Mengembangkan kapasitas dan kualitas hidup melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

### 30. Karakteristik Pembinaan

Karakteristik Pembinaan Menurut French dan Bell dalam Thoha (2003), yaitu :

- 31. Lebih menitikberatkan pada proses organisasi daripada isi substansi, meskipun tidak sepenuhnya mengesampingkan isi.
- 32. Menekankan pentingnya kerja tim sebagai kunci untuk memahami perilaku secara lebih efektif.
- 33. Fokus pada pengelolaan kolaboratif dalam budaya kerja tim.
- 34. Menyoroti manajemen yang berbasis pada budaya sistem secara keseluruhan.
- 35. Menggunakan pendekatan *action research* dalam proses perubahan.
- 36. Melibatkan pakar perilaku sebagai agen perubahan atau katalisator.
- 37. Merupakan pendekatan perubahan yang menysar proses-proses yang sedang berlangsung.
- 38. Memberi perhatian khusus pada hubungan sosial dan kemanusiaan.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

### 39. Teknik Pembinaan

Teknik pembinaan merupakan suatu proses yang kompleks dan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi. Teknik ini mencakup cara pegawai bekerja agar mencapai hasil optimal, dengan menekankan efisiensi, kualitas, dan keseragaman output. Secara umum, teknik dalam pembinaan berhubungan dengan metode pelaksanaan kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan aliran informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pembinaan, melalui data yang diperoleh dan telah dipraktikkan secara luas oleh semua pihak yang terlibat.

Menurut Mintzberg (dalam Alfonsus Sirait, 1991), teknik pembinaan memiliki fokus yang luas dan bersifat jangka panjang. Ia menguraikan empat pendekatan utama dalam pelaksanaan teknik pembinaan, yaitu:

#### a) Teknik Adaptif

Merupakan teknik yang fleksibel, relatif, dan terfragmentasi, yang mampu menyesuaikan diri secara berliku-liku dalam menghadapi hambatan.

#### b) Teknik Perencanaan (Planning Strategy)

Teknik ini memberikan arah dan pedoman yang jelas melalui prosedur sistematis, termasuk analisis lingkungan dan organisasi untuk menyusun rencana masa depan.

#### c) Teknik Sistematis dan Terstruktur

Teknik ini didasarkan pada pilihan rasional terhadap peluang dan ancaman lingkungan, yang disusun agar selaras dengan misi dan kemampuan organisasi.

#### 40. Strategi Pembinaan

**Strategi pembinaan** merupakan upaya untuk menyatukan arah organisasi dengan berbagai tujuannya, serta mengarahkan sumber daya secara efektif agar organisasi dapat mencapai tujuan tersebut. Menurut Robert H. Hayes (dalam Alfonsus Sirait, 1991), terdapat lima ciri utama dari strategi pembinaan (*directing strategy*), yaitu:

##### 41. Wawasan Waktu (*Time Horizon*)

42. Strategi mencakup perencanaan jangka panjang, termasuk waktu pelaksanaan dan waktu untuk melihat dampaknya.

##### b) Dampak (*Impact*)

Strategi yang diterapkan akan menghasilkan pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan.

##### c) Pemusatan Upaya (*Concentration of Effort*)

Strategi yang efektif memfokuskan sumber daya dan perhatian pada sasaran yang terbatas namun strategis.

##### d) Pola Keputusan (*Pattern Decision*)

Keputusan-keputusan dalam strategi harus saling mendukung dan mengikuti pola yang konsisten.

##### e) Peresapan (*Pervasiveness*)

Strategi mencakup berbagai aspek kegiatan, dari alokasi sumber daya hingga implementasi di lapangan.

#### 43. Materi Pembinaan

Materi pembinaan mencakup pengelolaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, seperti tenaga kerja (pegawai), dana (uang), perlengkapan (peralatan), bahan atau material, serta waktu yang diperlukan. Semua elemen ini harus tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, materi pembinaan juga mencakup bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan selama pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pengorganisasian prosesnya. Dengan demikian, informasi terkait pembinaan dapat disampaikan dengan baik dalam pelaksanaannya. Materi pembinaan ini sangat penting dalam tahap persiapan, baik berupa standar maupun formulir yang dapat digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek krusial dari suatu kegiatan.

Menurut Soewarno, materi pembinaan merupakan bentuk standar atau dokumen lisan yang dirancang untuk menggambarkan secara jelas dan teliti hal-hal penting yang harus dipraktikkan. Materi ini berfungsi sebagai catatan informasi yang disusun secara sistematis agar dapat disampaikan dengan tertib sebagai dokumen resmi. Intinya, hasil dari proses pembinaan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, sehingga menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, efisiensi menjadi aspek yang sangat penting, karena efisiensi mencerminkan perbandingan optimal antara input (sumber daya) dan output (hasil pelaksanaan). Oleh karena itu,

tujuan akhir dari pembinaan adalah tercapainya hasil yang efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).

#### 44. Tahapan Pembinaa

Menurut Sumodiningrat, pembinaan tidak berlangsung selamanya, melainkan ditujukan agar individu atau kelompok yang dibina dapat mandiri. Meskipun pembinaan dilepas, pengawasan tetap dilakukan dari kejauhan untuk memastikan agar tidak terjadi kemunduran. Pandangan ini menunjukkan bahwa pembinaan merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap hingga mencapai kemandirian. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, proses pembelajaran dalam konteks pembinaan dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

##### a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku

Tahap awal ini berfokus pada menumbuhkan kesadaran dan kepedulian individu, sehingga muncul dorongan internal untuk meningkatkan kapasitas diri. Pada tahap ini, perubahan sikap dan pola pikir mulai dibentuk agar individu menyadari pentingnya pengembangan diri.

##### b) Tahap Transformasi kemampuan

Pada tahap ini, individu diberikan berbagai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan dasar. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan serta membekali individu dengan kemampuan awal yang dibutuhkan agar mereka mampu berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan.

### c) Tahap Peningkatan Kapasitas

Tahap ini bertujuan mengembangkan lebih lanjut kemampuan intelektual, keterampilan, dan kecakapan individu. Dengan peningkatan tersebut, diharapkan tumbuh inisiatif serta kemampuan untuk berinovasi, yang menjadi landasan penting menuju kemandirian.

## 2.3 Gelandangan dan Pengemis

### 1. Pengertian gelandangan dan pengemis

Istilah Gepeng merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis, yang mencakup individu-individu seperti peminta-minta, musafir, dan pekerja jalanan. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, pengemis didefinisikan sebagai “orang yang meminta-minta”, dengan kata dasar "kemis". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan adalah seseorang yang hidup di luar standar kelayakan yang berlaku di masyarakat, tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan tetap di suatu wilayah, serta hidup berpindah-pindah di ruang publik.

Bagi sebagian orang, aktivitas mengemis dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar sebuah respons terhadap kekalahan dalam menghadapi sistem sosial yang ada. Fenomena ini muncul dari kondisi struktural yang tidak berpihak kepada mereka, di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem sosial, politik, atau ekonomi yang berlaku. Ketidakmampuan tersebut, baik terhadap sistem yang tampak adil maupun yang jelas-jelas tidak manusiawi, menyebabkan mereka tersingkir dan menjadi bagian dari kelompok

yang terpinggirkan atau disebut juga sebagai orang buangan (Putra, 2012).

Tiga gambaran umum tentang gepeng, yaitu:

- 1) Sekelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan
- 2) Individu yang terpinggirkan dari kehidupan social secara umum
- 3) Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan

## **2. Karakteristik Gelandangan**

- 1) Gelandangan umumnya merupakan individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan menjalani kehidupan berpindah-pindah atau menetap sementara di ruang-ruang publik, terutama di kawasan perkotaan.
- 2) Mereka cenderung tidak memiliki dokumen identitas resmi serta menunjukkan pola hidup yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku, dengan perilaku yang cenderung bebas, tidak terikat aturan, dan kurang memperhatikan tata nilai masyarakat.
- 3) Dalam aspek ekonomi, kelompok ini tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan sering mengandalkan cara-cara subsisten seperti mengemis, memungut sisa makanan, atau mengumpulkan barang-barang bekas untuk bertahan hidup.

## **3. Karakteristik Pengemis**

- 1) Laki-laki/ perempuan
- 2) Aktivitas utama yang dilakukan adalah meminta bantuan secara langsung kepada masyarakat di berbagai lokasi strategis seperti permukiman warga,

pusat perbelanjaan, perempatan jalan (terutama di dekat lampu lalu lintas), pasar tradisional, rumah ibadah, serta tempat-tempat umum lainnya.

- 3) Untuk menarik simpati, mereka kerap menampilkan perilaku yang dirancang agar menimbulkan rasa iba, seperti berpura-pura mengalami gangguan kesehatan, memerintah secara halus, atau melantunkan doa-doa dan kutipan ayat suci. Tak jarang, mereka juga mengatasmakan sumbangan untuk kelompok atau organisasi tertentu.
- 4) Meski berstatus sebagai pengemis, sebagian dari mereka sebenarnya memiliki tempat tinggal tetap dan hidup berdampingan dengan masyarakat umum, namun tetap memilih untuk melakukan aktivitas mengemis sebagai mata pencaharian utama.

#### **4. Faktor-faktor penyebab terjadinya Gelandangan dan Pengemis**

- 1) Kondisi ekonomi yang buruk, tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta mengakses layanan publik secara memadai. Ketidakmampuan ini secara langsung menghambat pengembangan kualitas hidup, baik secara individu maupun dalam lingkup keluarga.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan, sebagian besar gelandangan memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formal. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam mengakses pekerjaan yang memerlukan keterampilan atau syarat administratif tertentu.

- 3) Minimnya keterampilan kerja, ketiadaan atau ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja membuat gelandangan kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja formal maupun informal. Kurangnya pelatihan atau pengalaman kerja menjadi penghalang untuk memperoleh penghasilan yang layak.
- 4) Krisis harga diri, rendahnya kepercayaan diri dan harga diri pada sebagian gelandangan menjadikan mereka tidak merasa malu atau enggan ketika melakukan aktivitas meminta-minta. Keadaan ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang penuh penolakan, kegagalan, atau marginalisasi sosial.
- 5) Sikap menyerah terhadap keadaan, sebagian gelandangan memiliki pola pikir fatalistik, yakni menganggap bahwa kondisi kemiskinan dan status sebagai gelandangan adalah takdir yang tidak dapat diubah. Sikap ini membuat mereka kehilangan motivasi untuk memperbaiki keadaan atau mencari peluang yang lebih baik dalam hidup.

#### **5. Dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan gelandangan dan pengemis**

- 1) Masalah lingkungan, gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti taman-taman, bawah jembatan, dan pinggiran kali. Oleh karena itu, kehadiran mereka di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan dan keindahan kota.

- 2) Masalah Administrasi Kependudukan, banyak gelandangan dan pengemis yang menjalani kehidupan berpindah-pindah di ruang-ruang publik tidak memiliki dokumen resmi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Ketidakterdaftarannya mereka dalam sistem administrasi di tingkat kelurahan atau RT/RW menyebabkan sulitnya pendataan serta pengawasan. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang hidup berpasangan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah secara hukum maupun agama, yang memperkuat kondisi ketidakjelasan status sosial dan hukum mereka.
- 3) Masalah keamanan dan ketertiban, tingginya keberadaan gelandangan dan pengemis di suatu wilayah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial. Selain memicu ketidaknyamanan masyarakat, keberadaan mereka juga dapat meningkatkan potensi tindak kriminalitas kecil serta memperburuk citra ketertiban dan keamanan lingkungan, terutama di kawasan perkotaan yang padat aktivitas.

## **2.4 Dinas Sosial**

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas ini, bersama Dinas Tenaga Kerja, menjalankan fungsi utama dalam mengelola urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat di bidang kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, serta pembinaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas Sosial

mendapatkan dukungan dari para pekerja sosial yang memiliki kompetensi khusus di bidang pelayanan sosial.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **deskriptif**, yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan implementasi program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu memberikan pemahaman yang utuh terhadap dinamika pelaksanaan program serta interaksi sosial yang menyertainya.

Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, baik dari segi perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, dalam konteks yang bersifat alamiah. Proses ini dilakukan melalui deskripsi naratif menggunakan bahasa sehari-hari, dengan memanfaatkan metode-metode yang bersifat naturalistik.

Data deskriptif dalam penelitian ini dianggap sebagai indikator yang mencerminkan norma, nilai sosial, serta kekuatan struktural lain yang memengaruhi perilaku individu atau kelompok. Sementara itu, metode kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata lisan, tulisan, atau tindakan yang dapat diamati dari subjek penelitian, bukan dalam bentuk angka atau statistik.

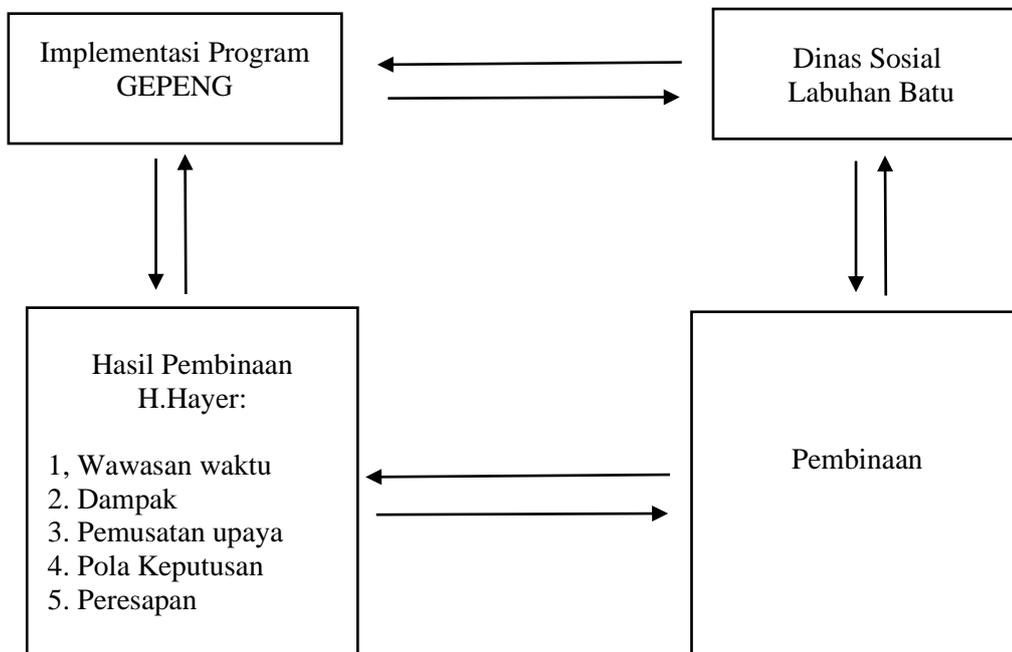
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan program penanganan gelandangan dan

pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga tantangan yang dihadapi di lapangan.

### 3.2 Kerangka Konsep

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah alur pikir yang berfungsi sebagai alat pijakan yang memungkinkan peneliti untuk menggali data lapangan, agar tidak membuat persepsi sendiri.

Permasalahan Gepeng saat ini masih tetap menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, Gepeng merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

### 3.3 Defenisi Konsep

#### a) Implementasi

**Implementasi** merupakan proses memahami dan menelaah realitas yang terjadi setelah suatu program atau kebijakan resmi diberlakukan atau dirumuskan (Pramono, 2020). Fokus utama dari implementasi kebijakan terletak pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik, mencakup serangkaian peristiwa dan aktivitas yang muncul setelah pedoman kebijakan disahkan. Dengan kata lain, implementasi menitikberatkan pada pelaksanaan nyata di lapangan, bagaimana instruksi atau ketentuan dalam kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret oleh para pelaksana, serta bagaimana respons masyarakat atau pihak yang terdampak terhadap kebijakan tersebut.

#### b) Program

Program adalah suatu rencana terstruktur yang terdiri dari serangkaian kegiatan atau tindakan yang saling berkaitan, dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu (Mulyati et al., 2022). Program biasanya disusun berdasarkan kebutuhan atau permasalahan yang ingin diatasi, dan dilengkapi dengan sumber daya, jadwal pelaksanaan, serta indikator pencapaian.

#### c) Pembinaan

Pembinaan menurut Widjaya adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan kebutuhan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha

perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkan. Menurut Hidayat,S pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakantindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untukmencapai suatu tujuan.

d) Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Gelandangan adalah orang yang hidup dengan keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain (Ikhsan, 2020) Gelandangan dan pengemis perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya masyarakat umum pada biasanya, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dan kesejahteraan (*basic and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

### 3.5 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi

penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi penelitian ini sebagai berikut:

- a) Adanya tahapan dalam Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Serta kerja sama antara Dinas Sosial dalam Perogram Pembinaan Gelandangan dan Pengemis.
- b) Adanya aktivitas program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial.
- c) Adanya kegiatan terencana program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial.
- d) Adanya tujuan tertentu pada program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial.

### **3.6 Narasumber Penelitian**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Bidang dan Staff Bidang Dinas Sosial Labuhan Batu sebanyak 3 orang. Dengan karakteristik narasumber adalah:

- 1) Kepala Bidang Rehabilitas : Bapak Arif Rahman
- 2) Gepeng (2 orang): Aisyaputra (11 tahun) dan Hendea Parlindungan (21 tahun)

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 1) Observasi, merupakan kegiatan pengamatan atau pemantauan terhadap objek atau situasi tertentu dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini adalah observasi tanpa partisipasi, peneliti hanya mengamati dari luar tanpa perlu melibatkan dirinya.

- 2) Wawancara, yaitu rangkaian pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh keterangan atau pendapat seseorang.
- 3) Studi dokumen, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan melakukan penelusuran melalui buku, jurnal, arsip, dokumen dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2005), analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan pengelolaan data melalui langkah-langkah seperti mengorganisasikan, memilah, dan menyusun data ke dalam satuan-satuan yang dapat diatur dan dipahami. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi pola, menyusun sintesis, menemukan hal-hal penting, serta merumuskan temuan yang bermakna dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Proses analisis tidak hanya sekadar mengolah data mentah, tetapi juga berupaya menyederhanakan informasi yang diperoleh agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasi sebagai bagian dari upaya menjawab pertanyaan atau permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui proses deskripsi dan interpretasi mendalam. Peneliti berusaha menggali makna dari setiap informasi yang diperoleh, menghubungkannya dengan konteks penelitian, dan menyajikannya secara terstruktur guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dan memadai.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Model ini terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan dan berlangsung secara simultan, yaitu:

1. **Reduksi Data**

Merupakan proses penyaringan, pemilahan, dan pemusatan perhatian pada data yang penting dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan akan dieliminasi untuk memudahkan peneliti dalam mengelola informasi inti.

2. **Penyajian Data**

Setelah direduksi, data kemudian disusun dalam bentuk yang terorganisir, seperti narasi, tabel, atau diagram, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan mengidentifikasi pola atau hubungan antar data.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap akhir dari analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini tidak bersifat final, namun terus diverifikasi sepanjang proses penelitian untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil analisis mampu memberikan gambaran yang akurat dan mendalam mengenai implementasi program penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

### **3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Waktu penelitian dilakukan oleh peneliti terhitung dari bulan Mei 2024 hingga selesai. Objek dari penelitian ini adalah Implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Labuhan Batu
- 2) Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Dinas Sosial Labuhan Batu, Jln. Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

### **3.10 Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

Berdasarkan salah satu sumber penelitian, Kabupaten Labuhanbatu yang beribukota di Rantauprapat memiliki luas wilayah mencapai 922.318 hektare (setara dengan 9.223,18 km<sup>2</sup>), yang mencakup sekitar 12,87% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini merupakan daerah terluas kedua di provinsi tersebut setelah Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis, Labuhanbatu berada di jalur strategis lintas timur Pulau Sumatera, dengan jarak sekitar 285 km dari Kota Medan (ibu kota Provinsi Sumatera Utara), 329 km dari Provinsi Riau, dan 760 km dari Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat antara 1°26' hingga 2°11' Lintang Utara dan 91°01' hingga 95°53' Bujur Timur.

Kabupaten ini mempunyai wilayah terluas di Propinsi Sumatera Utara secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, 209 Desa dan 33 Kelurahan. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju

Propinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka

Data yang diperoleh melalui Wikipedia, jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sebanyak 172.862 jiwa. Kabupaten ini dipenuhi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa aspek yang menjadi gambaran umum Labuhan Batu antara lain (Pane, 2020) :

45. Geografis dan Demografi

46. Lokasi: Labuhan Batu terletak di wilayah pesisir timur Sumatera Utara, berjarak sekitar 270 km dari Kota Medan, ibu kota provinsi.

47. Penduduk: Kota ini memiliki populasi yang cukup padat, dengan penduduk yang beragam dari sisi suku, agama, dan budaya. Mayoritas penduduk adalah suku Batak, Melayu, Jawa, dan Mandailing.

48. **Topografi:** Labuhan Batu berada di dataran rendah dengan iklim tropis, sehingga sebagian besar wilayahnya beriklim panas dan lembap.

49. Ekonomi

50. Sektor Utama: Ekonomi Labuhan Batu didominasi oleh sektor perdagangan dan perkebunan. Banyak perkebunan kelapa sawit, karet, dan berbagai komoditas pertanian lain yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

51. Industri: Di kabupaten ini juga berkembang beberapa industri kecil dan menengah, seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan jasa transportasi.

52. Pasar dan Fasilitas Ekonomi: Labuhan Batu memiliki sejumlah pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan bagi penduduk setempat serta beberapa pasar modern yang terus berkembang.
53. Infrastruktur dan Transportasi
54. Akses Transportasi: kabupaten ini memiliki akses transportasi darat yang menghubungkannya dengan Medan dan kota-kota lain di Sumatera Utara, seperti melalui jalan lintas Sumatera. Stasiun kereta api Labuhan Batu juga menjadi pusat transportasi penting di kawasan ini.
55. Infrastruktur Umum: Labuhan Batu memiliki fasilitas umum yang mencakup rumah sakit, sekolah, dan pusat-pusat layanan sosial. Namun, infrastruktur ini masih perlu pengembangan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus berkembang.
56. Pendidikan dan Sosial
57. Layanan Pendidikan: Terdapat berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, dengan beberapa perguruan tinggi atau akademi yang mulai berkembang. Namun, beberapa penduduk masih harus menempuh pendidikan tinggi di kota-kota yang lebih besar.
58. Masalah Sosial: Labuhan Batu juga menghadapi masalah sosial, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan keberadaan gelandangan serta pengemis. Ini mendorong pemerintah setempat untuk menjalankan program-program sosial yang membantu mengatasi permasalahan tersebut.
59. Secara keseluruhan, Labuhan Batu adalah kabupaten yang sedang berkembang dengan tantangan dan potensi ekonomi, sosial, serta budaya

yang khas. Pemerintah setempat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan perekonomian demi kesejahteraan masyarakatnya.

### **3.10.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Labuhan Batu**

Dinas Sosial Labuhan Batu merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pelayanan sosial bagi masyarakat di Labuhan Batu dan sekitarnya. Sebagai instansi yang menangani masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam membantu kelompok-kelompok rentan, seperti gelandangan, pengemis, lansia, anak-anak terlantar, dan keluarga miskin, agar mereka bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.



**Gambar 4. 1 Dinas Sosial Labuhan Batu**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

1. Pemberdayaan di bidang sosial
2. Rehabilitasi sosial
3. Perlindungan dan jaminan sosial

#### 4. Penanganan fakir miskin

#### 5. Kesejahteraan sosial masyarakat

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu berlokasi di Jalan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 21411. Kantor ini berdiri di atas lahan seluas 499 m<sup>2</sup>, dengan bangunan fisik berupa gedung satu lantai.

Pada awalnya, Dinas Sosial merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu, yaitu sebagai salah satu bidang yang menangani urusan kesejahteraan sosial. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas persoalan sosial di wilayah tersebut, kebutuhan akan lembaga yang secara khusus menangani isu-isu sosial semakin mendesak. Oleh karena itu, sejak tahun 2017, Dinas Sosial resmi berdiri sebagai instansi mandiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja.

Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Berdirinya dinas ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam merespons tantangan sosial yang semakin kompleks.

Dalam perjalanannya, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh Bapak H. Sofyan Ependy Harahap, SP sejak tahun 2017 hingga 2019. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Syahrizal Hasibuan, SE yang menjabat hingga saat ini.

### **3.10.2 Visi dan Misi Dinas Sosial**

#### **1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”.

#### **2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan maka Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :**

60. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
61. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
62. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;
63. Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan social

### **3.10.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Labuhan Batu**

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pembentukan instansi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pemerintah daerah kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016

mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan masalah-masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Adapun untuk tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

64. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memiliki tanggung jawab membantu Bupati Labuhanbatu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Sosial menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain:

65. Menyusun perencanaan kebijakan teknis di bidang sosial tingkat kabupaten;

66. Merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;

67. Merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;

68. Merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;

69. Merumuskan, menetapkan, mengatur, serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dalam penanganan fakir miskin;

70. Merumuskan, menetapkan, dan mengatur upaya penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
71. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin dan PMKS lainnya;
72. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin dan PMKS lainnya;
73. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

74. Sekertaris

Sekretaris Dinas Sosial bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas, khususnya dalam bidang urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta mengoordinasikan program kegiatan dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi yang berada di lingkungan Dinas Sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan beberapa fungsi utama sebagai berikut:

75. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kegiatan di lingkungan Dinas Sosial
76. Menyelenggarakan serta memberikan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Dinas;

77. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja Dinas secara efektif;
78. Menangani dan mengelola urusan keuangan Dinas secara menyeluruh;
79. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Dinas; Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pengelolaan data statistik;
80. Mengelola administrasi kepegawaian, administrasi umum, surat-menyurat, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, serta pengelolaan data statistik;
81. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan di Sekretariat Dinas;
82. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan pada setiap Bidang di lingkungan Dinas Sosial;
83. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.
84. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Sub Bagian Umum memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian dari tugas Sekretaris, khususnya dalam bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
85. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
86. Mengelola administrasi surat menyurat serta penanganan arsip di lingkungan Dinas;

87. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Dinas;Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Dinas;
88. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian secara efektif;
89. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan Dinas;
90. Mengatur dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat dinas, serta pelaksanaan upacara kantor;
91. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, perawatan, inventarisasi, serta pengusulan penghapusan barang dan aset milik Dinas;

92. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Sekretaris, khususnya di bidang penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Dinas Sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

93. Menyusun rencana dan program kerja untuk Sub Bagian Program;
94. Merumuskan kebijakan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;
95. Mengkoordinasikan serta mempersiapkan penyusunan rencana strategis Dinas;
96. Menyusun jadwal kegiatan tahunan Dinas secara sistematis;
97. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas;

98. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana anggaran kerja Dinas;

99. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

100. Melaksanakan koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan seluruh kegiatan yang berlangsung di lingkungan dinas;

101. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian dari tugas Sekretaris, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang mencakup pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, serta perbendaharaan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

102. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;

103. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;

104. Meneliti dan mengkaji Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Anggaran Kas untuk pengelolaan keuangan dinas;

105. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, termasuk penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pembukuan;

106. Melakukan koordinasi serta menyusun kebijakan terkait laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;

107. Memeriksa dan menguji kelengkapan dokumen seperti surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

108. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);

109. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang terkait dengan pemberdayaan sosial. Tugas ini meliputi pengkajian bahan kebijakan teknis, penyusunan program, serta fasilitasi dalam pemberdayaan individu dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, serta pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

110. Menyusun program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial secara terencana;

111. Melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;

112. Mengkaji bahan-bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;

113. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial serta pengendalian terhadap usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mencakup pemberdayaan keluarga, kelembagaan sosial, serta pengembangan nilai

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;

114. Memberikan petunjuk teknis dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;

115. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

116. Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas :

Bidang Rehabilitasi Sosial bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan fokus pada koordinasi dan pengendalian kegiatan rehabilitasi sosial. Tugas ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan tuna sosial.

Fungsi :

117. Menyusun rencana dan program kerja yang menjadi tanggung jawab Bidang Rehabilitasi Sosial;

118. Mengoordinasikan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;

119. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial

120. Melakukan pembinaan serta memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;

121. Menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial;

122. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang relevan dengan bidang tugas dan fungsi

123. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Bidang ini melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan melakukan pembinaan serta pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial.

Fungsi :

124. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
125. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
126. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
127. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk menjalin kerja sama yang baik dan mendukung dalam pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial;
128. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian guna mencegah timbulnya masalah sosial;
129. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
130. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya
131. Bidang Penanganan dan Fakir Miskin

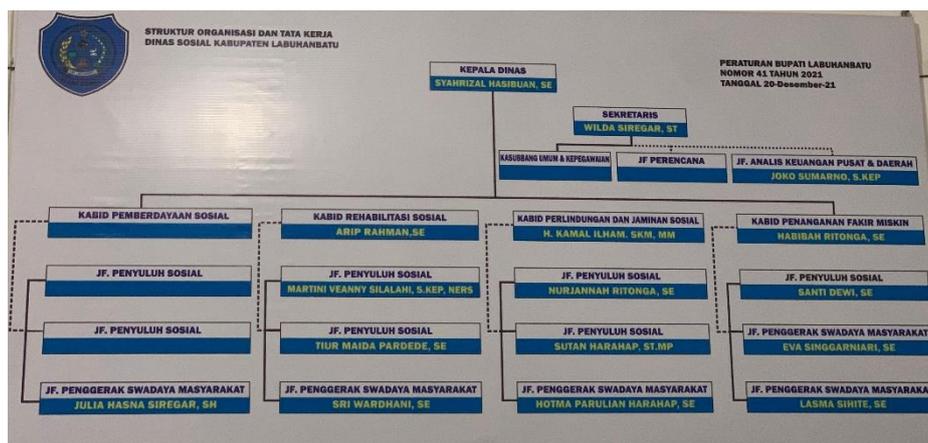
Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan tanggung jawab mengoordinasikan dan menjalankan kebijakan umum terkait penanganan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin di wilayah Kabupaten, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan stimulan, serta penataan lingkungan.

Fungsi :

132. Merumuskan kebijakan umum Bidang Penanganan Fakir Miskin yang bersifat terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi guna memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin;
133. Menyusun rencana kerja Bidang Penganan Fakir Miskin;
134. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
135. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
136. Mengelola data fakir miskin yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu
137. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan, serta penataan lingkungan bagi fakir miskin.

### 3.10.4 Struktur Organisasi



138. **Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Labuhan Batu**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

###### **4.1.1.1 Langkah Awal Dinas Sosial Labuhan Batu dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis**

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti setelah mewawancarai Bapak AR tanggal 22 Oktober 2024 pukul 11.00 Wib selaku Sekertaris Bidang sebagai narasumber dalam penelitian, terdapat beberapa langkah

awal yang dilakukan Dinas Sosial Labuhan Batu dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, yakni:

139. **Pendataan dan Identifikasi:** Langkah pertama adalah melakukan pendataan dan identifikasi gelandangan dan pengemis di wilayah Labuhan Batu. Kegiatan ini juga diiringi dengan kegiatan melakukan Razia
140. **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Memberikan penyuluhan kepada gelandangan dan pengemis tentang program pemerintah serta risiko hidup di jalan. Sosialisasi juga melibatkan masyarakat agar memiliki kesadaran lebih dalam menangani masalah ini.
141. **Kerja Sama dengan Instansi Terkait:** Dinas Sosial berkolaborasi dengan berbagai instansi, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga sosial, untuk memberikan penanganan yang lebih menyeluruh.
142. **Pelatihan dan Pembekalan Keterampilan:** Setelah mengidentifikasi kebutuhan individu, mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan yang relevan untuk membantu mereka mandiri. Ini bisa berupa pelatihan kerja, kursus keterampilan, atau pendampingan untuk memulai usaha kecil.
143. **Program Bantuan dan Rehabilitasi:** Mendirikan program rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan, seperti konseling, dukungan kesehatan mental, dan bantuan untuk mengatasi masalah sosial lain yang mungkin menjadi penyebab mereka hidup di jalan.
144. **Pemantauan dan Evaluasi:** Langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pembinaan, apakah program yang dijalankan efektif dan apa saja yang perlu ditingkatkan untuk memastikan

keberhasilan program jangka panjang.

#### **4.1.1.2 Tantangan Utama yang dihadapi Dinas Sosial Labuhan Batu dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis**

Setelah melakukan berbagai upaya dalam pembinaan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Labuhan Batu cukup banyak mendapati berbagai tantangan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak AR, terdapat beberapa tantangan utama yang diharapi antara lain:

145. Seiring dilaksanakannya pembinaan, gelandangan dan pengemis tetap saja kembali ke lokasi yang telah di razia dengan berbagai alasan, beberapa gelandangan dan pengemis tersebut melakukan aktivitas mereka kembali di lokasi tertentu.
146. Stigma Sosial dan Penolakan dari Masyarakat: Gelandangan dan pengemis sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga ada resistansi dari publik terhadap program pembinaan. Hal ini dapat menyulitkan mereka dalam berintegrasi kembali ke masyarakat atau mendapat kesempatan pekerjaan.
147. Ketergantungan pada Kehidupan Jalanan: Sebagian gelandangan dan pengemis sudah lama hidup di jalan dan merasa nyaman atau enggan meninggalkan gaya hidup ini. Kebiasaan yang sudah terbentuk dalam waktu lama bisa membuat mereka enggan mengikuti program pembinaan atau mencari pekerjaan tetap.
148. Masalah Kesehatan Fisik dan Mental: Banyak gelandangan dan pengemis yang memiliki masalah kesehatan, baik fisik maupun mental.

Menangani isu ini memerlukan penanganan yang komprehensif dan mendalam, yang sering kali melibatkan tenaga dan biaya yang besar.

#### **4.1.1.3 Peran Teknologi Dalam Mendukung Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Labuhan Batu**

Dari informasi yang didapatkan, Dinas Sosial Labuhan Batu belum ada menggunakan teknologi dalam bentuk apapun sebagai alat untuk mendukung pembinaan gelandangan dan pengemis sekitar. Melakukan pembinaan masih dengan menggunakan cara dan alat yang sederhana dan tradisional. Hal ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat, sebagaimana yang diketahui bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembinaan dengan mempermudah pendataan, komunikasi, pelatihan, dan penggalangan dana.

#### **4.1.1.4 Kebijakan Dinas Sosial Labuhan Batu Dalam Mengukur Keberhasilan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis**

Untuk mengukur keberhasilan pembinaan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Labuhan Batu dapat menerapkan beberapa kebijakan yang terstruktur dan terukur sebagai berikut:

1. Indikator Kemandirian dan Reintegrasi Sosial: Salah satu indikator utama keberhasilan adalah tingkat kemandirian gelandangan dan pengemis setelah pembinaan, seperti kemampuan mereka untuk bekerja atau menjalankan usaha kecil, serta kemampuan mereka untuk kembali dan berintegrasi dalam masyarakat. Data mengenai individu yang

berhasil beralih dari ketergantungan di jalan menuju kehidupan yang mandiri dapat dijadikan ukuran keberhasilan.

2. **Tingkat Keberlanjutan dan Pengurangan Populasi di Jalan:** Keberhasilan pembinaan dapat diukur dari penurunan jumlah gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah mengikuti program. Data ini bisa diambil melalui survei berkala atau melalui pemantauan sistematis di lapangan.
3. **Evaluasi Peningkatan Keterampilan dan Pekerjaan:** Dinas Sosial dapat melakukan evaluasi pada keterampilan yang telah diajarkan dalam program pelatihan. Peningkatan keterampilan kerja dan peningkatan angka yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha merupakan indikator keberhasilan dalam aspek ekonomi.
4. **Kualitas Layanan dan Tingkat Kepuasan Penerima Program:** Pengukuran keberhasilan juga dapat dilakukan melalui survei kepuasan penerima layanan pembinaan. Kepuasan ini mencakup kualitas layanan, akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, makanan, dan kenyamanan di fasilitas yang disediakan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa program berjalan sesuai kebutuhan.
5. **Pendampingan dan Pemantauan Pasca Pembinaan:** Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembinaan bertahan dalam jangka panjang. Dinas Sosial dapat melakukan pemantauan jangka panjang terhadap para peserta yang telah keluar dari program.

Indikatornya mencakup kemandirian finansial, stabilitas tempat tinggal, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial.

#### **4.1.1.5 Jenis layanan Yang Telah Disiapkan Dinas Sosial untuk Gelandangan dan Pengemis**

Berdasarkan hasil wawancara tambahan yang telah dilakukan bersama salah satu narasumber yang merupakan kepala Bidang Rehabilitas yakni Bapak Arif Rahman, terdapat beberapa layanan yang telah disiapkan Dinas Sosial untuk Gelandangan dan pengemis, diantaranya adalah :

1. Pelayanan Pengajuan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
2. Pelayanan KPM Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Pelayanan Penanggulangan Bencana (TAGANA)
4. Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Pelayanan Bantuan Pangan Non Tunai
6. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
8. Pelayanan Rehabilitas Sosial
9. Pelayanan Pembimbingan Sosial

#### **4.1.1.6 Cara Dinas Sosial Memastikan Bahwa Program Peminaan Yang Dilaksanakan Berkelanjutan dan Tidak Hanya Bersifat Sementara**

Untuk memastikan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya sementara, Dinas Sosial menerapkan beberapa strategi dan pendekatan yang sistematis, antara lain:

### **1. Pendampingan Jangka Panjang**

Dinas Sosial menugaskan tenaga pendamping sosial yang secara rutin melakukan kunjungan dan evaluasi terhadap penerima program.

### **2. Pelatihan Berkelanjutan dan Peningkatan Kapasitas**

Program pembinaan tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dirancang dalam bentuk pelatihan bertahap dan berkesinambungan.

### **3. Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Setiap program pembinaan dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, baik secara internal oleh Dinas Sosial maupun melalui kerja sama dengan instansi lain.

### **4. Kemitraan dengan Lembaga Lain**

Untuk menjaga keberlanjutan, Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan komunitas lokal. Melalui kemitraan ini, peserta program dapat melanjutkan proses pembinaan atau mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.

### **5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Beberapa program pembinaan mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pelaporan dan komunikasi antara pendamping dan peserta, sehingga proses pembinaan dapat terus berjalan meski tanpa pertemuan langsung.

#### **4.1.1.7 Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Sosial untuk Menangani Kasus Gelandangan dan Pengemis Yang Memiliki Masalah Ketergantungan Pada Narkotika**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Januari 2025 dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu yaitu Bapak Arif Rahman (Kepala Bidang Rehabilitas Dinas Sosial), diketahui bahwa penanganan terhadap Gepeng yang teridentifikasi penggunaan narkotika mendapat perlakuan secara khusus, yakni langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kondisi gepeng, termasuk aspek fisik, psikis, dan latar belakang penggunaan zat adiktif. Proses ini juga melibatkan Dinas Kesehatan setempat.

Setelah proses asesmen, apabila ditemukan adanya ketergantungan narkotika, maka individu yang bersangkutan akan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi di pusat-pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk. Rehabilitasi ini meliputi aspek medis maupun psikososial, guna mengembalikan kondisi fisik dan mental yang stabil.

Dinas Sosial tidak hanya berhenti pada tahap rehabilitasi, tetapi juga melanjutkan dengan program pascarehabilitasi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan (relapse) serta mendukung integrasi sosial kembali. Program pascarehabilitasi ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pelatihan keterampilan kerja, seperti menjahit, bertukang, tata boga, dan keterampilan lainnya yang disesuaikan dengan minat serta potensi individu.
2. Pembinaan mental dan spiritual, yang dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk membentuk karakter dan ketahanan pribadi.
3. Pemberdayaan ekonomi, melalui bantuan modal usaha mikro serta pelibatan dalam program kewirausahaan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Selain itu, pendekatan berbasis keluarga juga menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan oleh Dinas Sosial. Dalam hal ini, pihak dinas secara aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan keluarga atau kerabat dekat dari gepeng yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

Narasumber dari Dinas Sosial menekankan bahwa upaya penanganan gepeng dengan masalah ketergantungan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kita tidak bisa hanya menyerahkan semuanya ke satu pihak saja. Harus ada sinergi dari semua unsur, karena ini menyangkut perubahan hidup seseorang,” ujar salah satu staf Dinas Sosial dalam wawancara tersebut.

Sebagai dokumentasi empirik dan penambahan informasi terkait pembahasan ini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Gepeng yang juga menjadi narasumber dalam penelitian yakni saudara Hendea. Hendea merupakan salah satu individu yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba satu tahun yang lalu. Ia menceritakan pengalamannya saat pertama kali dijangkau oleh petugas sosial.

“Waktu itu saya memang udah tidak punya arah hidup, tidur di emperan toko, makan seadanya, dan kalau dapat uang sedikit langsung saya pakai beli sabu. Sampai akhirnya saya dirazia dan dibawa ke Dinas Sosial, awalnya saya takut, tapi ternyata mereka bukan hanya menampung saya, mereka bantu saya untuk keluar dari lingkaran itu.” (Wawancara, Hendea, 2025)

Setelah menjalani rehabilitasi selama kurang lebih 6 bulan, Hendea mengikuti rehabilitasi yang difasilitasi oleh Dinas Sosial. Ia juga mengikuti pembinaan spiritual yang dibimbing oleh tokoh agama setempat. Hendea juga mengatakan ”Saya diajak ikut pengajian dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Awalnya saya gak percaya diri, tapi lama-lama saya jadi semangat. Sekarang saya bekerja menjadi badut jalanan, yang biasanya menghibur pengendara dipersimpangan lampu merah, dengan harapan modal saya terkumpul dan bisa membuka usaha kecil-kecilan. Terima kasih untuk Dinas Sosial Labuhan Batu yang sudah banyak membantu saya keluar dari jeratan Narkoba.” (Wawancara, Hendea, 2025)

Selanjutnya diperoleh dari narasumber yang merupakan badut jalanan juga yaitu Aisyaputra yang masih berusia 11 tahun dan terpaksa harus putus sekolah karena keadaan ekonomi dan lingkungan sekitar yang

membuatnya berada di sekitar lingkungan pengguna Narkotika, namun jelasnya ia hanya melihat disekitarnya, dan hanya mendapatkan beberapa kali ajakan untuk merokok, namun ia tidak terpengaruh oleh ajakan itu, dan hanya fokus dengan tujuannya yaitu mencari uang jajan menjadi badut jalanan yang diawali dengan ajakan teman sebayanya. Berikut ujaranya "Aku hanya melihat aja kak, dan beberapa kali pernah diajak, tapi aku gamau, dan aku tolak, karna tau itu gak baik" (Wawancara, Aisyaputra, 2025). Sehingga yang menjadi pokok dalam penanganan pasti pihak Dinas Sosial yang ditarik menjadi narasumber inti dalam memperjelas sub point ini hanyalah Hendea (21 tahun).

Melalui pengalaman dan kisah Hendea, 21 Tahun (Badut Jalanan) menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mampu memberikan harapan baru bagi individu yang sebelumnya terpinggirkan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, upaya penanganan gepeng dengan masalah ketergantungan narkotika tidak hanya berhenti pada aspek penyelamatan, tetapi juga menciptakan jalan menuju kemandirian dan reintegrasi sosial.

## **4.2 Pembahasan**

Dinas Sosial Labuhan Batu menjalankan berbagai kebijakan untuk memastikan keberhasilan program pembinaan gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk membantu mereka bertransformasi menjadi individu yang mandiri dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan

yang ditetapkan adalah sejauh mana para penerima program mampu membangun kemandirian finansial dan sosial. Dengan mengevaluasi tingkat kemandirian mereka, Dinas Sosial dapat memahami apakah individu-individu tersebut siap untuk menjalani hidup tanpa ketergantungan pada kehidupan jalanan.

Keberhasilan program juga diukur dari penurunan jumlah gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah mengikuti pembinaan. Untuk ini, dilakukan pemantauan dan survei berkala yang bertujuan memetakan seberapa efektif program dalam membantu individu-individu ini keluar dari siklus kehidupan jalanan. Dinas Sosial juga menaruh perhatian pada peningkatan keterampilan kerja yang diberikan dalam program. Dengan adanya pelatihan, para penerima program diharapkan mampu bekerja atau memulai usaha kecil, yang mana keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah yang berhasil memperoleh pekerjaan atau memiliki usaha mandiri.

Dinas Sosial mengutamakan kualitas layanan dalam setiap tahap pembinaan. Hal ini dievaluasi dengan mengukur tingkat kepuasan penerima program terhadap layanan yang disediakan. Fasilitas yang nyaman, akses terhadap kebutuhan dasar, serta dukungan penuh selama pembinaan menjadi poin penting dalam menjaga kualitas layanan. Tingkat kepuasan yang tinggi menjadi sinyal bahwa program pembinaan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pendampingan pasca-pembinaan menjadi langkah lanjutan untuk memastikan bahwa hasil positif yang dicapai dapat bertahan dalam jangka panjang. Para peserta yang telah menyelesaikan program dipantau untuk melihat stabilitas keuangan mereka, kemandirian tempat tinggal, dan keterlibatan mereka dalam

kegiatan sosial. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat mengevaluasi secara komprehensif apakah perubahan yang terjadi bersifat berkelanjutan.

Dinas Sosial Labuhan Batu juga bekerja sama dengan lembaga penelitian atau akademisi guna mendapatkan evaluasi independen yang lebih objektif atas program yang dijalankan. Evaluasi dari pihak ketiga ini memberikan perspektif tambahan terkait efektivitas program, tantangan yang dihadapi, serta potensi perbaikan untuk pengembangan program lebih lanjut. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan ini, Dinas Sosial Labuhan Batu terus berupaya untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi gelandangan dan pengemis di wilayahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu, sebagai berikut :

- a. Komunikasi

Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu telah melaksanakan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis sesuai dengan tugas, pokok, dan

fungsi (TUPOKSI) masing-masing. Sosialisasi Peraturan Daerah Bupati Labuhan Batu juga sudah dilakukan, namun upaya sosialisasi tersebut belum maksimal karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan.

b. Sumber Daya

Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Sosial Labuhan Batu memiliki staf pelaksana yang memadai. Namun, kemampuan staf pelaksana masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi beban kerja yang bertambah dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

c. Disposisi (Sikap)

Pemahaman Dinas Sosial terkait pembinaan gelandangan dan pengemis sudah baik, baik dari langkah-langkah maupun tindakan yang diambil. Sikap tanggung jawab dan koordinasi antara atasan dan bawahan juga sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Faktor Penghambat Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Dinas Sosial Labuhan Batu, sebagai berikut :

- a. Rendahnya kesadaran dari gelandangan dan pengemis itu sendiri.
- b. Keterbatasan jumlah petugas lapangan dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis.
- c. Masalah Kesehatan Fisik dan Mental yang dialami oleh banyak gelandangan dan pegemis, yang mempengaruhi efektivitas pembinaan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Di Dinas Sosial Labuhan Batu yaitu :

149. Dinas Sosial Labuhan Batu harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya, khususnya pada ketersediaan team petugas lapangan dan prasarana yang akan digunakan ketika akan membina gelandangan dan pengemis agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan optimal.
150. Dinas Sosial Labuhan Batu seharusnya diharapkan untuk bisa memberikan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan skill (kemampuan) yang serius kepada gelandangan dan pengemis di Kota Labuhan Batu. Disamping itu program pengembangan ekonomi dilingkungan gelandangan dan pengemis harus ditingkatkan, agar mereka sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariska Tri Viky Andani, Endah Setyowati, F. A. (2019). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas. *Jiap*, 5(3), 328–336.
- Daulay, A. S. M. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. ... *Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan ...*, 2(April), 57–67.
- Hamdala, T., & Esabella, S. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa

- Berbasis Web. *Jurnal Informatika, Teknologi dan Sains*, 2(2), 105–111.  
<https://doi.org/10.51401/jinteks.v2i2.591>
- Hesti, H., & Muhtadi, T. Y. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Tangerang. *Lex Veritatis*, 2(3), 77–82.
- Ikhsan, M. (2020). *Program studi ilmu pemerintahan pekanbaru 2020 1*.
- Jailani, A., Hendra, Y., & Priadi, R. (2020). Analisis Implementasi Fungsi Media Massa Pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 2(2), 85–93.
- Kasus, S. (2022). *Analisis Pelaksanaan Pemberdayaan Gelandangan Melalui*. 16(2), 51–57.
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947–954.
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 105–119.
- Mulyati, Y., Ridwan Caesar, M., Purnama, E., Studi, P., & Negara, A. (2022). Res Publica: Journal of Social Policy Issues Article Information Abstract. *Res Publica*, 1(1), 49–60.
- Pane, Y. R. S. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Pada Sektor Informal Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu*. 1–23.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Pustaka, K., Berpikir, K., & Proposisi, D. A. N. (n.d.). *Raja Syahmulia Harahap, dan*. 1–41.
- Putra, N. (2012). *Pengemis dalam Perspektif Psikologi Komunikasi*. January 2012, 1–4.
- Ramadhani, W. (2021). Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis.

- Simon, J. (2017). Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan. *jurnal publik UNDHAR MEDAN*, 11(2), 51–58.
- Sitorus, G. F., Program, & Komunikasi, I. (2020). *Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah sumatera utara 2020*. 1, 2–3.

## Lampiran 1 Draft Wawancara

### DRAFT WAWANCARA

Nama : Imelda Irmadhana Putri

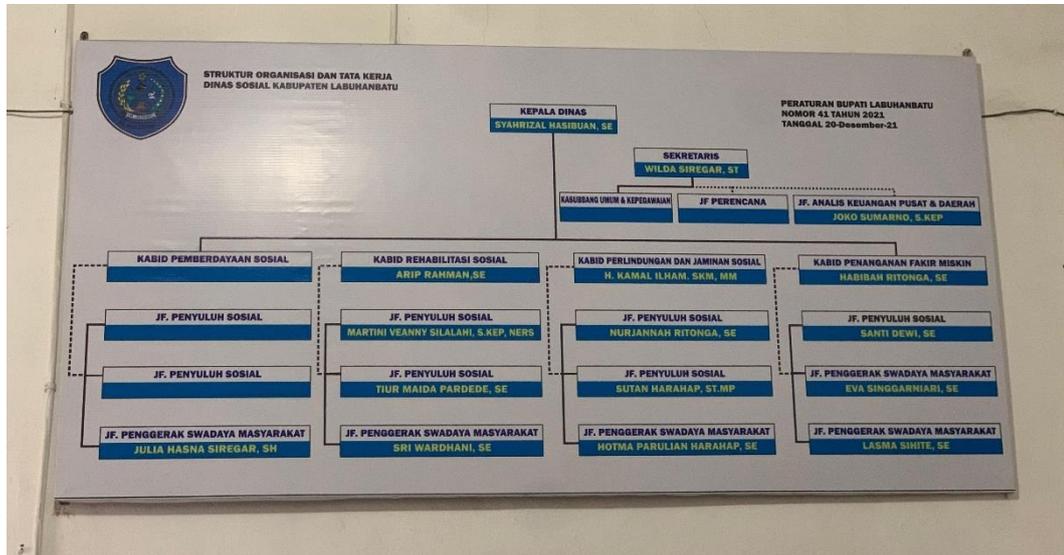
NPM : 2003100062

Acc Pemb  
 4/2020  
 Syafriyudin S.S., MH

#### A. Adanya tahapan dalam Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

1. Apa saja langkah langkah awal yg diambil oleh dinas sosial dalam mengimplementasikan program pembinaan gelandangan dan pengemis?
2. Apa saja tantangan utama yg dihadapi dinas sosial dalam mengimplementasikan program pembinaan gelandangan dan pengemis?
3. Apa peran teknologi dalam mendukung implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di dinas sosial?
4. Bagaimana dinas sosial mengukur keberhasilan Implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis?
6. Jenis layanan apa saja yang sudah disiapkan Dinas Sosial untuk gelandangan dan pengemis?
7. Bagaimana cara Dinas Sosial memastikan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara?
8. Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menangani kasus gelandangan dan pengemis yang memiliki masalah ketergantungan pada narkoba?

## Lampiran 2 Struktur Organisasi dan Visi Misi Dinas Sosial



### Lampiran 3 Form Asesment PPKS dan Surat Pernyataan

#### FORM ASESMEN PPKS

##### A. IDENTITAS DIRI

Nama : AUS YAPUTKA  
 Nik :  
 Tempat/Tanggal Lahir : Balai Pesa,  
 Jenis Kelamin : Laki - laki  
 Agama : ISLAM  
 Status : Anak  
 Pendidikan Terakhir : Kelas 6 SD ( SD 5 Puntau Prapat )  
 Kategori PPKS : ANAK  
 Kondisi Fisik : SEHAT  
 No Hp :  
 Alamat KTP : Jl. Balai Desa  
 Alamat Domisli : Jl. Balai Desa.

##### B. IDENTITAS KELUARGA / WALI

Nama : Isyah ( Ayah Syarif )  
 Nik :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Agama : Islam.  
 Hubungan : Ibu dan Ayah  
 No Hp :  
 Alamat KTP : Jl. Balai Desa. 99. Sumter Amul.  
 Alamat Domisli :

##### C. PERMASALAHAN

..... main brutal di jalanan karena ....  
 .....

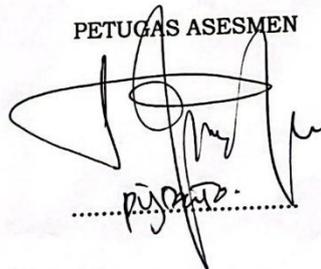
##### D. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rehabilitasi, penanganan PPKS & keluarga  
 .....

##### E. LAYANAN YANG DIBUTUKAN

.....  
 .....

PETUGAS ASESMEN

  
 .....



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyahputra  
Tempat/Tanggal Lahir : 13-3-2011  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Alamat : 26.5.U.M.P.T. AMAL JAL. J.N. B. rd. 22

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan saya (sebagai... baru... di... jalanan...) di Kota Rantauprapat dan sekitarnya. Apabila saya kembali melakukan hal yang sama, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku atas kesalahan yang saya buat.

Rantauprapat, 05 Agustus 2023  
Yang Membuat Pernyataan

Aisy  
Aisyahputra



An. Aisyahputra

## Lampiran 4 Form Asesment PPKS dan Surat Pernyataan

**FORM ASESMEN PPKS****A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Hendra Parindungan NST  
 Nik :  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, Umur 21. Thn  
 Jenis Kelamin : Laki laki  
 Agama : Islam  
 Status : Belum Menikah  
 Pendidikan Terakhir : SMP.  
 Kategori PPKS : Rawan.  
 Kondisi Fisik : Sehat  
 No Hp :  
 Alamat KTP : Jl. pekan lama pendan.  
 Alamat Domisli : Sironygo-rnygo. (Meyontrak.)

**B. IDENTITAS KELUARGA / WALI**

Nama : Teti Hotma senama, Ayah (Tampin NST).  
 Nik :  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jl. pekan lama pendan.  
 Agama : Islam.  
 Hubungan : Ibu Ayah.  
 No Hp :  
 Alamat KTP : Jl. pekan lama pendan.  
 Alamat Domisli :

**C. PERMASALAHAN**

..... Menjadi brdat dijalan karena Belit macorri  
 keri.....  
 .....

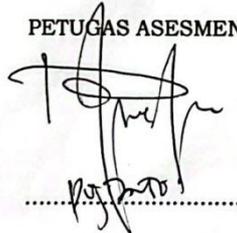
**D. RENCANA TINDAK LANJUT**

..... Melakukan ketidaktahuan dan memperbaiki penerapan  
 Dehanyo PPKS  
 .....

**E. LAYANAN YANG DIBUTUKAN**

..... Konsep Peran LK3, dan memperbaiki  
 Baran Berlyta sambaco  
 .....

PETUGAS ASESMEN

  
 .....



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Parlindungan NST  
 Tempat/Tanggal Lahir : 6-8 Agustus  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
 Alamat : Siringo Ringo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan saya (main badut di jalan) di Kota Rantauprapat dan sekitarnya. Apabila saya kembali melakukan hal yang sama, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku atas kesalahan yang saya buat.

Rantauprapat, Agustus 2023  
 Yang Membuat Pernyataan

3AB

Hendra Parlindungan NST



An. Hendra Parlindungan Nasution

## Lampiran 5 Form Asement PPKS dan Surat Pernyataan

### FORM ASEMENT PPKS

#### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Lesmeri Tampubolon  
 Nik :  
 Tempat/Tanggal Lahir : baliqe - 5 - 5 - 1977  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : udah nikah anak tiga  
 Pendidikan Terakhir :  
 Kategori PPKS : Mengeris  
 Kondisi Fisik : Baik  
 No Hp :  
 Alamat KTP :  
 Alamat Domisli : RT 06 PA, KEL - STAKARUKO

#### B. IDENTITAS KELUARGA / WALI

Nama :  
 Nik :  
 Tempat/Tanggal Lahir :  
 Agama :  
 Hubungan :  
 No Hp :  
 Alamat KTP :  
 Alamat Domisli :

#### C. PERMASALAHAN

Mengeris, rumah rusak, anak 3, 1 mengeris  
 2 sekolah korban di PPKS Mubandiyah.

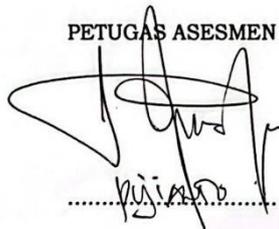
#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Menyusun Laporan dan memberikan  
 laporan kepada PPKS.

#### E. LAYANAN YANG DIBUTUKAN

Mendapatkan bantuan berupa perbaikan rumah  
 (sambutan).

PETUGAS ASESMEN

  
 Pujianto



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lesmeri<sup>o</sup> Tampubolon  
 Tempat/Tanggal Lahir : balige  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
 Alamat : P.G.A. 30 Lon dorung

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak akan mengulangi perbuatan saya (.....<sup>Militer</sup>.....) di Kota Rantauprapat dan sekitarnya. Apabila saya kembali melakukan hal yang sama, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku atas kesalahan yang saya buat.

Rantauprapat, 03 Agustus 2023  
 Yang Membuat Pernyataan





**An. Lesmeri Tampubolon**

## Lampiran 6 Berita Acara

### BERITA ACARA

Rantau prapat Kamis 03 Agustus 2023 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengadakan razia gabungan dimana razia gabungan tersebut yang terdiri dari Polrest Labuhanbatu, Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan razia terhadap gelandangan dan pengemis disekitaran kota Rantau prapat

Dari hasil razia tersebut terdapat 1 orang manusia silver dan 3 orang badut yang meminta-minta di jalan S.M Raja Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan tepatnya di persimpangan lampu Traffight light jalan Perisai, dan 4 orang pengemis meminta-minta di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Rantau Utara tepatnya di persimpangan lampu Traffight light pos polisi simpang 4

Berdasarkan hasil assessment oleh Dinas Sosial, Polrest Labuhanbatu dan Satpol PP dengan melaksanakan wawancara diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kegiatan meminta-minta ditengah jalan dimulai pukul 10.00 wib s/d 17.00 wib
- Pendapatan perhari rata-rata ± Rp.150.000 dan pendapatan tersebut dibagi 2 antara badut dengan pemilik kostum
- Dari pendapatan meminta-minta menurut pengakuan tersebut untuk biaya kehidupan keluarga

Sebagai tindak lanjut pengemis dan badut dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk diadakan pembinaan

Setelah diadakan pembinaan para badut dan pengemis berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karena pekerjaan sebagai badut dan pengemis tidak dibenarkan di kerjakan di perempatan jalan karena mengganggu pengguna jalan raya badut dan pengemis tidak layak menjadi pekerjaan.

Oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyarankan kepada para badut untuk mencari pekerjaan agar tidak meminta-minta lagi karena dapat mengganggu pengguna jalan raya sebaiknya mencari tempat dimana banyak anak-anak bermain agar anak-anak tersebut terhibur dengan kehadiran para badut tersebut sehingga para orang tua anak tersebut bergerak hatinya memberi uang kepada para badut

Dan kepada para pengemis sebaiknya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.

KEPALA DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN  
LABUHANBATU  
SYAHRIZAL HASIBUAN, SE  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
DINAS SOSIAL  
NIP. 19700116 199503 1 003

**Lampiran 7 Dokumentasi**







## Lampiran 8 SK-1



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/23/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 Website: <http://fslp.umu.ac.id> Email: [fslp@umu.ac.id](mailto:fslp@umu.ac.id) Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Medan, 11 Januari 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Imelda Imadhana Putri  
 NPM : 2003100062  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis Di dinas Sosial Kota Rantauprapat	Ace 11/2024
2	Peningkatan efektivitas Program keluarga Harapan (IKH) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Rantauprapat	
3	Dampak penggunaan teknologi fidik jari dalam meningkatkan efektivitas layanan administrasi sekolah di Rantauprapat.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
  - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 11 Januari 2024.

Ketua

Program Studi.....

(Ananda Mahardika, S.Sos., MSP.....)  
 NIDN:

Pemohon,

(Imelda Imadhana Putri.....)  
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Syafuddin S.Sos M.H.....)  
 NIDN:

(30) pb: Syafuddin S.Sos M.H



## Lampiran 9 SK-2



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 134/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **11 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IMELDA IRMADHANA PUTRI**  
 N P M : 2003100062  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL LABUHAN BATU**  
 Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 038.20.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Januari 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 06 Rajab 1445 H  
 18 Januari 2024 M

  
 Dekan  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN.0080017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



## Lampiran 10 SK-3

 <p><b>UMSU</b> Unggul   Cerdas   Terpercaya Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya</p>	<p>MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH</p> <p><b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA</b></p> <p><b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b></p> <p>UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/KU/2022</p> <p>Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003</p> <p><a href="https://fisp.umsu.ac.id">https://fisp.umsu.ac.id</a> ✉ <a href="mailto:fisp@umsu.ac.id">fisp@umsu.ac.id</a> 📱 <a href="#">umsumedan</a> 📧 <a href="#">umsumedan</a> 📄 <a href="#">umsumedan</a> 📧 <a href="#">umsumedan</a></p>
	Sk-3

**PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth. Medan, 05 Juni ..... 2024  
**Bapak Dekan FISIP UMSU**  
 di  
 Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Imelda Imadhana Putri  
 N P M : 2003100062  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 134.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di dinas sosial kota Rantau prapat

.....

.....

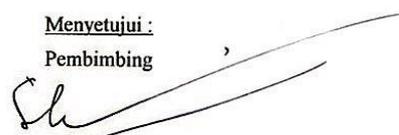
.....

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :  
 Pembimbing

  
 (SYAFRUMANIA S. S.O.S. MH)  
 NIDN: 0130056601

Pemohon,  
  
 (... Imelda Imadhana Putri ...)

## Lampiran 10 Surat Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 1201/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024  
 Lampiran : -  
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 16 Muharram 1446 H  
 22 Juli 2024 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Sosial Labuhan Batu  
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **IMELDA IRMADHANA PUTRI**  
 N P M : 2003100062  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL LABUHAN BATU**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



## Lampiran 11 Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Gelugur No.18A Rantauprapat, Sumatera Utara, 21414  
 Telepon – Faksimile –  
 LAMAN [dinsos.labuhanbatukab.go.id](http://dinsos.labuhanbatukab.go.id)

Rantauprapat, 08 Agustus 2024

Nomor : 460/ 926 /DINSOS/II/2024  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :  
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 c/q Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor  
 1201/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Izin Penelitian maka  
 dengan ini Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut :

Nama : Imelda Irmadhana Putri  
 NPM : 2003100062  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Skripsi : Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di  
 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Untuk melaksanakan/mengadakan Izin Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu,  
 dengan ketentuan dapat mengikuti tata tertib dan disiplin yang berlaku pada Dinas Sosial  
 kabupaten Labuhanbatu

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KABUPATEN LABUHANBATU**  
 Sekretaris  
  
**WILDA SIREGAR, ST**  
 PEMBINA TK.I (IV/b)  
 NIP. 19771023 200312 2 002

## Lampiran 1 Draft Wawancara

## DRAFT WAWANCARA

Nama : Imelda Imadhana Putri

NPM : 2003100062

Acc. Pamb  
Sle  
SUPERVISOR K. B. S. M. H.

## A. Adanya tahapan dalam Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

1. Apa saja langkah langkah awal yg diambil oleh dinas sosial dalam mengimplementasikan program pembinaan gelandangan dan pengemis?
2. Apa saja tantangan utama yg dihadapi dinas sosial dalam mengimplementasikan program pembinaan gelandangan dan pengemis?
3. Apa peran teknologi dalam mendukung implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di dinas sosial?
4. Bagaimana dinas sosial mengukur keberhasilan implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis?
6. Jenis layanan apa saja yang sudah disiapkan Dinas Sosial untuk gelandangan dan pengemis?
7. Bagaimana cara Dinas Sosial memastikan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara?

8. Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menangani kasus gelandangan dan pengemis yang memiliki masalah ketergantungan pada narkoba?



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 1036/UND/II.3.AU/UMSU-03/IF/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Juni 2024  
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	HAPSAH MELISAH HASIBUAN	2003100054	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS GAYA KEPIMPINAN LASEZ FAIRE KETUA ORGANISASI MAPOSO NAULI BULUNG DI DESA SINUNUKAN KABUPATEN NATAL
7	INDRI MAUDINA	2003100053	DEDI AMPRIZAL, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS FUNGSI MANAJEMEN PERSONALIA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) DI PUSKESMAS KECAMATAN BANDAR HULLAN
8	IMELDA IMADYANA PUTRI	2003100052	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA RANTAU PRAPAT
9	MALCINI GREGAR	2003100007	Asoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	DEDI AMPRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERINTAH KOTA MEDAN TENTANG LARANGAN KELUAR SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN
10					

Medan, 13 Dzulhijah 1445 H  
 20 Juni 2024 M





## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://filsip.umsu.ac.id> [filsip@umsu.ac.id](mailto:filsip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-5

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Imelda Imadhana Putri  
 N P M : 2003100062  
 Program Studi : Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK  
 Judul Skripsi : Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Rantauprapat

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22.6.2024	- Perbaiki kata yang salah pada Bab I - uraian hooky baik perlu ada pada latar belakang.	
2.	25.6.2024	- Urutian baik perlu nama lengkap - Urutian harus ada nama dan tahunnya	
3.	28.6.2024	- Perbaiki Kesalahan pada Bab II - Urutian baik perlu ada pada Bab II - Urutian silsilah observasi dan ganti dgn penelitian awal.	
4.	6.7.2024	- Ate Bab. I, II dan III	
5.	28.10.24	- Perbaiki Kesalahan yang di tulis pada Bab IV	
6.	1.11.24	- simpulan harus sesuai dengan analisis dan pembahasan - saran merupakan masalah dan sudah dibagi peneliti.	
7.	2.11.24	- Urutian silsilah keperluan dari skripsi (cv, abstrak, dll)	
8.	3.11.24	- Ate Pemb skripsi siap di berikan dalam sidang ptegrasi	

Medan, 3.11.2024



Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardika, S.Sos., M.P.P.)  
 NIDN: 012118801

Pembimbing,

(Syafrudin, S.Sos., M.H.)  
 NIDN: 0130056601





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Imelda Irmadhana Putri  
NPM : 200310062  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat, 13 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Siringo-ringo Gang Ubudiah II,No 19  
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

**Nama Orangtua**

Nama Ayah : Bustami  
Nama Ibu : Fatimah  
Alamat : Jl.Siringo-ringo Gang Ubudiah II,No 19

**Jenjang Pendidikan**

2007-2013 SD Swasta Panglima Polem Rantauprapat  
2013-2016 SMP Negeri 1 Rantau Utara  
2016-2019 SMA Negeri 2 Rantau Utara  
2020-2024 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara